

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan Blud RSUD Sleman Kabupaten Sleman

Nur Azizah¹, Miranti², Tyarasya Salsabila Putri³, Sarah Rolian⁴

University Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

63210023@bsi.ac.id¹, 63210040@bsi.ac.id², 63200261@bsi.ac.id³, 63210426@bsi.ac.id⁴

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 6 Juni 2024 Halaman : 753-762	<i>This research aims to determine the economic level, efficiency and effectiveness of the financial performance of BLUD RSUD Sleman Regency Sleman. This research uses quantitative methods with a descriptive analysis approach. The author uses the Work Plan and Budget Realization Report document used for this research by confirming that the Value For Money indicator is in accordance with Minister of Finance Regulation number 214 of 2017. The object of this research is the BLUD RSUD Sleman Regency Sleman. The results of this research show the performance of the BLUD RSUD Sleman Regency Sleman is still less economical and inefficient, but effective based on the Minister of Finance's Performance Measurement Regulation number 214 of 2017.</i>
Keywords: BLUD Financial Performance Value For Money	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penulis menggunakan dokumen Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan untuk penelitian ini dengan menegaskan bahwa indikator Value For Money sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 Tahun 2017. Objek penelitian ini adalah BLUD RSUD Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman masih kurang ekonomis dan tidak efisien, namun efektif berdasarkan Peraturan Pengukuran Kinerja Menteri Keuangan nomor 214 Tahun 2017.

Kata Kunci: BLUD, Kinerja Keuangan, Value For Money

PENDAHULUAN

Sejak adanya reformasi keuangan daerah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kinerja Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap cara mengelola yang baik dan benar hingga dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang. Pemberian hak otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri dan tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan (Pemendagri No 13 2006).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu entitas pemerintahan tingkat regional/daerah yang bertugas memberikan layanan terbaik mereka kepada masyarakat baik segi barang dan atau jasa. Salah satu yang termasuk ke dalam BLUD ialah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memberikan layanan terbaik berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Selama ini teknologi terus berkembang sehingga bidang layanan Kesehatan juga terkena dampak perkembangan ini sehingga semakin hari dunia Kesehatan semakin melaju namun hal ini juga membuat tingkat krisis atas pengambilan keputusan juga meningkat. Salah satunya adalah RSUD Sleman yang telah menerapkan dan menjalani Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD).

PPK ini perlu diperhatikan dimana tata kelola keuangan sangat diperlukan terutama yang memiliki respon terbaik dan juga fleksibel. Laporan keuangan sendiri memiliki fungsi yang sama yang mana sebagai informan alias pemberi informasi keuangan bagi pihak yang paling membutuhkan. Selain menjajikan data keuangan laporan ini juga biasanya dibuat lebih ke secara umum dan tidak rumit dan menghadirkan banyak macam rasio yang berguna untuk mengevaluasi serta memberikan interpretasi terkait laporan keuangan maka dari itu dalam Menyusun laporan tersebut maka setelah aktivitasnya dengan tuntas harus diselesaikan dan disediakan sebagai bukti maka diterbitkanla kuitansi yang mencantumkan kedua belah pihak dan uang yang terhutang yang disebut dengan kamar pintu geser (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 2007). Berikut ini adalah Laporan Realisasi Anggaran RSUD Sleman.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran RSUD Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2020-2021

Keterangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Realisasi 2021
Pendapatan	78.000.000.000	76.225.354.018	85.000.000.000	106.061.443.957
Belanja Langsung	123.978.872.613	101.737.032.788	156.282.457.090	129.448.625.082
Belanja Tidak Langsung	48.736.521.772	44.331.688.775	11.677.199.756	10.111.889.516
Surplus	-	-	-	-
Defisit	94.715.394.385	69.843.367.545	82.959.656.846	33.499.070.640

Sumber : <https://bkad.slemankab.go.id/lra-skpd/>

Tabel 1.2

Laporan Realisasi Anggaran RSUD Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023

Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Anggaran 2023	Realisasi 2023
Pendapatan	85.500.000.000	92.170.698.651	87.700.000.000	90.871.873.027
Belanja Langsung	161.695.401.339	142.448.377.917	155.324.892.758	143.311.815.104
Belanja Tidak Langsung	18.097.614.647	9.116.345.891	18.660.000.000	13.900.740.939
Surplus	-	-	-	-
Defisit	94.293.015.986	59.394.025.157	86.284.892.758	66.340.683.017

Sumber : <https://bkad.slemankab.go.id/lra-skpd/>

Hal krusial yang butuh diperhatikan dalam APBN suatu entitas ialah nilai ekonomis, efektivitas serta efisiensi yang dikenal dengan sebutan "Value for Money Concept" yang menjadi jembatan dalam pencapaian good governance. Salah satu instansi pemerintah yang wajib memberikan tanggungjawabnya secara finansial pada Pemda (Pemerintah Daerah) dan masyarakat ialah RSUD Sleman sehingga instansi ini wajib mengukur kinerja finansialnya sesuai dengan Permen (Peraturan

Menteri) Keuangan Nomor 214 tahun 2017 (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 2017).

Berdasarkan pemaparan kedua tabel diatas, menunjukkan realisasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2023 terlihat bahwa terjadi keberagaman antara anggaran dan realisasi. Sehingga terdapat fenomena nilai realisasi lebih besar dari anggaran. Maka dari itu dapat diartikan bahwa anggaran yang dianggarkan kurang, yang biasa disebut dengan “defisit” setiap tahunnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam dengan judul : “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, dan Efisiensi Kinerja Keuangan BLUD (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman)”.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan dengan konsep value for money (Tingkat ekonomis, efektivitas, dan efisiensi). Dalam penelitian ini berfokus pada Anggaran dan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Sleman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perhitungan rasio yang kemudian dideskripsikan dan ditarik sebuah kesimpulan.

Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder ini berupa dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Sleman. data sekunder dalam penelitian ini berupa sebuah catatan atau dokumentasi, publikasi pemerintah, web, internet, dan lainnya. Didapatkan langsung melalui website resmi PPID RSUD Sleman yang didalamnya berisi Gambaran umum instansi, informasi keuangan, informasi pelayanan, berbagai fasilitas, dan informasi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini saya mengumpulkan data sekunder. Data sekunder berupa catatan atau dokumentasi, dan publikasi pemerintah dari Rencana kerja dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2023 yang selanjutnya diolah dan disimpulkan dalam bentuk deskriptif.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman. Sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas pada pelaksanaan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Sleman tahun anggaran 2020-2023.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang berlandaskan pada tingkat rasio dengan konsep VRM (Mahsun, 2013) adalah sebagai berikut :

a) Rasio Ekonomi

Pengukuran ini membutuhkan data anggaran keluaran serta fakta dilapangan dimana diatas 100% mengindikasikan tidak ekonomis dan dibawah 90% termasuk kategori sangat ekonomis perhitungannya didapatkan dengan cara rumus :

$$\text{Rasio Eonomis} = \frac{\text{Pengeluaran Instansi}}{\text{Anggaran yang ditetapkan}} \times 100\%$$

b) Rasio Efisiensi

Pengukuran terkait perbandingan antara tingkat input dan output dengan data yang diperlukan untuk mengetahui rasio ini ialah realisasi biaya yang berkecimpung dalam aktivitas memperoleh pendapatan dengan kriteria diatas 100% mengindikasikan kinerja tidak efisien dan di bawah 60%

termasuk sangat efisien. Menurut Khasanah (2021) rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

c) Rasio Efektivitas

Pengukuran ini membutuhkan data target pendapatan yang ingin dicapai dengan kriteria diatas 100% maka sangat efektif dan dibawah 60% termasuk kategori tidak efektif. Menurut Khasanah (2021) rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio evektifitas antara lain :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah (Nur Dhanar 2022).

Laporan Realisasi Anggaran

Dalam PP No.12 2019 pasal 127 (2) menyebutkan Laporan pelaksanaan anggaran merupakan sebuah pelaporan dimana terdapat penggambaran dalam beda nilai anggaran dan pelaksanaan anggaran pada 1 (satu) periode pelaporan menurut struktural APBD akan dibagi menjadi beberapa kelompok, jenis, obyek serta perincian obyek perolehan, belanja, dan pendanaan (Peraturan Pemerintah No.12 2019).

Pelaporan ini merupakan instrument yang menjadi penjaga keselarasan antara tahapan perancangan dan akuntabilitas pemda. Dari pelaporan tersebut, pemda dapat mendapatkan informasi apa yang perlu dilakukan perbaikan guna perencanaan dan penganggaran tahun depan. Mengukur Kinerja Adanya tolok ukur pada tahapan ini dapat mempermudah pemerintah daerah untuk mengukur kinerja yang akan mencapai tujuan dan arget daripelayanan publik. Ciri dalam pendekatan ini ialah tahapan klarifikasi anggaran berlandaskan aktivitas maupun unit.

Value For Money (VRM)

Menurut Mahmudi (2010:83) value for money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini memiliki makna bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. Adapun tiga elemen utama dalam konsep value for money yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Jika ekonomi hanya membicarakan tentang input, maka efisiensi berbicara mengenai input dan output. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang

atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Elemen yang ketiga yaitu efektifitas. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektifitas berfokus pada outcome (hasil).

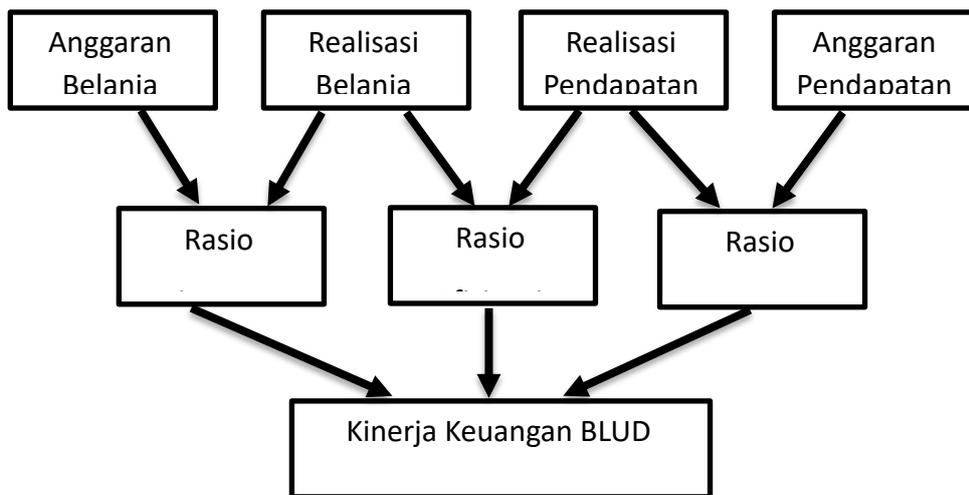
Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya (Iqbal, Rachman, and Rodiah 2021).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 menyatakan, bahwa Badan Layanan Umum Daerah merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas merupakan keleluasaan dalam mengelola keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka mamajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktik bisnis yang sehat dapat diartikan bahwa dalam penyelenggaraanya didasarkan pada kaidah-kaidah manajemen yang baik dengan cara pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 , 2018)

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

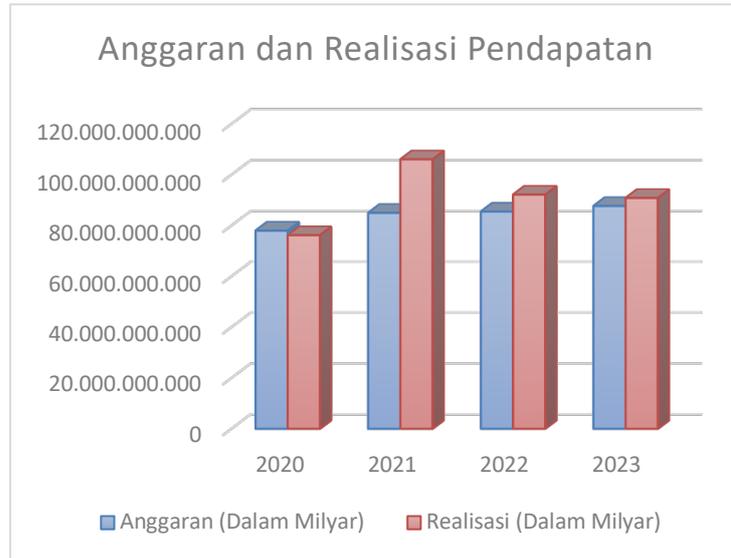
Penyajian Data

A. Pendapatan BLUD RSUD Sleman

Data pendapatan BLUD RSUD Sleman dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4.1.1

Anggaran Dan Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Sleman Tahun 2020-2023



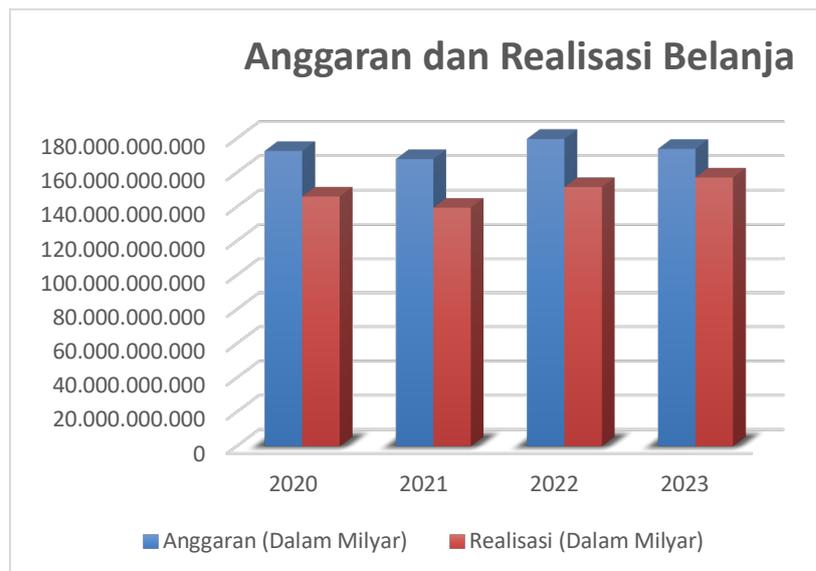
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Sleman

B. Belanja BLUD RSUD Sleman

Data Belanja BLUD RSUD Sleman dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4.1.2

Anggaran Dan Realisasi Belanja BLUD RSUD Sleman Tahun 2020-2023



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Sleman

Analisis Rasio Ekonomis

Berikut adalah Tabel hasil perhitungan pengukuran tingkat ekonomis BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023 :

Tabel 4.2.1 Rasio Ekonomis BLUD RSUD Sleman tahun 2020 - 2023

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomi
2020	Belanja Langsung	123.978.872.613	101.737.032.788	82,06%
	Belanja tidak langsung	48.736.521.772	44.331.688.775	90,96%
	Total Belanja	172.715.394.385	146.068.721.563	84,57%
2021	Belanja Langsung	156.282.457.090	129.448.625.082	82,83%
	Belanja tidak langsung	11.677.199.756	10.111.889.516	86,60%
	Total Belanja	167.959.656.846	139.560.514.598	83,09%
2022	Belanja Langsung	161.695.401.339	142.448.377.917	88,10%
	Belanja tidak langsung	18.097.614.647	9.116.345.891	50,37%
	Total Belanja	179.793.015.986	151.564.723.808	84,30%
2023	Belanja Langsung	155.324.892.758	143.311.815.104	92,27%
	Belanja tidak langsung	18.660.000.000	13.900.740.939	74,49%
	Total Belanja	173.984.892.758	157.212.556.043	90,36%
	Rata-rata	86.806.619.997	74.300.814.502	85,59%

Sumber : Data diolah (2024)

Rasio Ekonomi pada tiap jenis belanja mengacu pada Tabel 4.2.1 dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4.2.1 Rasio Ekonomi BLUD RSUD Sleman tahun 2020 - 2023

No	Jenis Belanja	Rasio Ekonom			
		2020	2021	2022	2023
1	Belanja Langsung	82,06%	82,83%	88,10%	92,27%
2	Belanja Tidak Langsung	90,96%	86,60%	50,37%	74,49%
	Total Belanja	84,57%	83,09%	84,30%	90,36%

Sumber : Data diolah (2024)

Tabel 4.2.1 menunjukkan bahwa kinerja BLUD RSUD Sleman dari segi ekonomi termasuk ke dalam kategori kurang baik yang direpresentasikan dengan kenaikan rasio di tiap tahunnya hanya pada tahun 2020 ke 2021 yang mengalami sedikit penurunan. Dimana rasio yang diperoleh secara berurutan dari tahun 2020 ialah 82.06%, 90.96%, 82.83%, dan 86.60%. Dari hasil tersebut sesuai kategori ekonomis, keadaan BLUD RSUD Sleman dalam realisasi anggarannya kurang ekonomis. Namun demikian, kinerja keuangan BLUD RSUD Sleman untuk belanja tidak langsung dapat dikatakan baik karena dari 2020-2022 mengalami penurunan rasio yang berarti adanya penghematan biaya-biaya yang diperlukan. Walaupun di tahun 2023 rasio Kembali naik karena adanya belanja barang habis pakai.

Analisis Rasio Efisiensi

Berikut adalah Tabel hasil perhitungan pengukuran tingkat Efisiensi BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023 :

Tabel 4.2.2 Rasio Efisiensi BLUD RSUD Sleman tahun 2020 – 2023

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2020	146.068.721.563	76.225.354.018	191,63%
2021	139.560.514.598	106.061.443.957	131,58%
2022	151.564.723.808	92.170.698.651	164,44%
2023	157.212.556.043	90.871.873.027	173,00%

Sumber : Data diolah (2024)

Kinerja keuangan BLUD RSUD Sleman dikatakan tidak efisien ditunjukkan oleh hasil perhitungan rasio efisiensi berurutan dari tahun 2020 sebesar 191.63%, 131.58%, 164.44%, 173.00%. Terlihat bahwa di tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan sedangkan di tahun 2022 – 2023 kembali mengalami peningkatan, sehingga mengindikasikan realisasi anggaran RSUD Sleman cukup efisien karna mengalami penurunan hingga tahun 2023.

Analisis Rasio Efektivitas

Berikut adalah Tabel hasil perhitungan pengukuran tingkat efektivitas BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023 :

Tabel 4.2.3 Rasio Efisiensi BLUD RSUD Sleman tahun 2020 – 2023

Tahun	Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas
2020	Pendapatan total	76.225.354.018	78.000.000.000	97,72%
2021	Pendapatan total	106.061.443.957	85.000.000.000	124,78%
2022	Pendapatan total	92.170.698.651	85.500.000.000	107,80%

2023	Pendapatan total	90.871.873.027	87.700.000.000	103,62%
------	------------------	----------------	----------------	---------

Sumber : Data diolah (2024)

Tingkat efektivitas dari anggaran yang fluktuatif berasal dari tidak terjadi sinkronisasi antara perkiraan anggaran dan fakta di kehidupan dengan kata lain anggaran tidak tercapai. Kinerja keuangan BLUD RSUD Sleman secara umum termasuk kedalam kategori efektif dengan hasil berurut dari tahun 2020 sebesar 97,72%, 124,78%, 107,80%, dan 103,62%. Rasio ini telah mencapai nilai diatas 100% walaupun di tahun 2020 sedikit menurun dan ralisasinya tidak tercapai karena adanya piutang tahun 2020.

KESIMPULAN

Perhitungan capaian kinerja tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas yang telah disesuaikan dengan regulasi yang ada dan setelah dilakukannya analisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Realisasi Anggaran di BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman kurang ekonomis.
- 2) Realisasi Anggaran di BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman tidak efisien.
- 3) Realisasi Anggaran di BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman efektif.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman harus mampu memperhitungkan dan membuat skala prioritas pengeluaran apa saja yang diperlukan agar biaya yang dikeluarkan lebih hemat dan sesuai kebutuhan.
- 2) Diharapkan BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman bukan hanya mampu meminimalisir pengeluaran namun juga mampu memaksimalkan pendapatan.
- 3) Memperhatikan capaian efektivitas agar kedepannya lebih baik lagi dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan agar realisasi pendapatan lebih efektif setiap tahunnya.
- 4) Peneliti kedepannya disarankan memperluas cakupan sampel agar lebih tergeneralisasi.
- 5) Peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis terkait strategi yang perlu diterapkan pada BLUD terutama BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kinerjanya.

REFERENCES

Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta

Iqbal, Muhammad, Dani Rachman, and Siti Rodiah. 2021. "Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah." *AKURAT //Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12(2): 18-34.

Nur Dhanar. 2022. "COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2, No. 5, September (2022)." 2(5): 12-15.

Pemendagri No 13. 2006. "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah." : 1-73.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007. 2007. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah." *Jdih Bpk*: 1-39.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018. 2018. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah." *World Development* 1(1): 1-53.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017. 2017. "Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga." : 1-43. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/214~PMK.02~2017Per.pdf>.
- Peraturan Pemerintah No.12. 2019. "Salina, N.¹" *Oxford English Dictionary*. doi:10.1093/oed/9600622025.